KOMPETISI ESAI
MAHASISWA NASIONAL

FIFest 2025
INDONESIA PHILANTHROPY FESTIVAL

UPTOURISM:
ELEVASI COMMUNITY-BASED ECOTOURISM DENGAN PENERAPAN SROI UNTUK DAMPAK SOSIAL BERKELANJUTAN

Cut Azhirah Apriadina - IPB University

FILANTROPI INDONESIA FESTIVAL (FIFEST) 2025

UPTOURISM: ELEVASI COMMUNITY BASED ECOTOURISM DENGAN PENERAPAN METODE *SOCIAL RETURN ON INVESTMENT* (SROI) UNTUK MEWUJUDKAN DAMPAK SOSIAL BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: SUMBA, NTT)

Oleh:

Cut Azhirah Apriadina

NIM.F2401241010

IPB UNIVERSITY

2025

“Pariwisata hendaknya bukan hanya sekadar media healing manusia, tetapi juga alamnya” - Ahmad Zakky Habibie, Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia

Gema dari Surga yang Terluka: Potensi dan Paradoks Pariwisata

Indonesia, dengan anugerah garis pantai terpanjang kedua di dunia, menyajikan lanskap eksotis yang membentang dari birunya laut beserta kekayaan terumbu karangnya hingga puncak-puncak gunung megah seperti Rinjani dan Jaya Wijaya. Salah satu serpihan surga tersebut bersemayam di Sumba, NTT. Sumba tidak hanya memukau lewat pantai kelas dunia seperti Nihiwatu, tetapi juga melalui hamparan sabana luas di Bukit Wairinding dan Puru Kambera, air terjun megah di Lapopu dan Tanggedu, serta perkampungan adat yang hidup harmonis dengan alam.

Kekayaan alam ini tak pelak menjadi fondasi utama sektor pariwisata yang diproyeksikan menjadi mesin ekonomi nasional. Menyadari potensi ini, Kemenparekraf menetapkan target ambisius pada 2025, yaitu kontribusi 4,6% terhadap PDB, devisa mencapai USD19-22,1 miliar, dan 14,6 hingga 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara (Portal Informasi Indonesia, 2025). Optimisme ini didasari harapan bahwa geliat pariwisata akan membuka lapangan kerja lokal, yang berpotensi menekan laju urbanisasi ke kota-kota besar.

Namun, di balik gemerlap angka dan potensi, pariwisata massal yang tak terkendali dapat melahirkan sebuah paradoks kondisi “*over-tourism*”. Kondisi ini menyisakan luka nyata pada alam. Sebagai contoh, Gunung Semeru yang didatangi hingga 500 pendaki per hari harus menanggung beban 250 kilogram sampah harian (wawancara humas Balai Besar Taman Nasional Bromo via BBC Indonesia). Lebih jauh lagi, pariwisata yang hanya mengejar kuantitas kunjungan berisiko tinggi membahayakan spesies endemik dan menggerus nilai-nilai luhur kebudayaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Visi Ideal Ekowisata Indonesia: Harapan dari Pemerintah dan Pasar

Menyadari risiko dari pariwisata massal, pemerintah mendorong transformasi menuju ekowisata. Sebagaimana dinyatakan oleh wakil Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf), Ibu Ni Luh, pada FiFest 2025, pariwisata ideal harus berbicara tentang cara “memelihara alam, budaya, dan masyarakat lokal”. Beliau menekankan bahwa untuk mencapai pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Regulasi saja tidak cukup, dibutuhkan pendekatan *bottom-up* yang melibatkan kesadaran bersama antara wisatawan dan komunitas lokal.

Untuk mewujudkan pendekatan *bottom-up* tersebut, *Community-Based Ecotourism* (CBET) diadopsi sebagai kerangka kerja utama. CBET dapat didefinisikan sebagai pendekatan pariwisata yang menekankan kepemilikan, pengelolaan, dan penerimaan manfaat terbesar oleh komunitas lokal, dengan tujuan tidak hanya ekonomi, tetapi juga pemberdayaan sosial serta pelestarian budaya dan lingkungan. Implementasi konkret dari CBET ini diwujudkan melalui program pengembangan desa wisata, dengan target ambisius mencapai 6.000 desa di seluruh Indonesia.

Visi pemerintah ini ternyata selaras dengan permintaan pasar yang semakin sadar akan isu keberlanjutan. Sebuah survei dari *SiteMinder's Changing Traveller Report 2025* menunjukkan bahwa 95% wisatawan Indonesia bersedia membayar lebih untuk akomodasi yang ramah lingkungan. Tren ini bahkan lebih kuat di kalangan generasi muda, di mana 97% Gen Z dan Milenial rela mengeluarkan anggaran lebih besar untuk penginapan yang berkelanjutan. Keselarasan antara visi pemerintah dan permintaan pasar ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekowisata di Indonesia.

Realita di Lapangan: Jebakan "Kesejahteraan Semu"

Meskipun CBET dan pengembangan desa wisata menjadi visi ideal, implementasinya di lapangan, khususnya pada desa yang basis ekonominya adalah lahan pertanian aktif, justru melahirkan sebuah konflik fundamental. Pendapatan dari menyewakan lahan untuk *homestay* atau beralih ke sektor jasa pariwisata seringkali terasa lebih cepat dan menggiurkan dibandingkan pendapatan dari bertani. Insentif ekonomi jangka pendek ini memicu ancaman serius, alih fungsi lahan masif di wilayah yang dapat disebut sebagai "desa lumbung pariwisata". Istilah ini merujuk pada wilayah pedesaan yang kekayaan agrarisnya justru menjadi target untuk menunjang industri pariwisata, baik sebagai lahan untuk akomodasi maupun sebagai lanskap pasif.

Meskipun fokus utama ekowisata adalah pelestarian, belum ada mekanisme pencegahan yang efektif untuk melindungi lahan produktif di desa-desa ini. Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2020) menunjukkan betapa nyatanya ancaman tersebut. Di Bali, luas lahan sawah menyusut dari 75.922 Ha pada 2015 menjadi 70.996 Ha pada 2019. Dalam periode yang sama, NTT kehilangan lahan sawah seluas 21.718 Ha, dari 177.238 Ha menjadi 155.520 Ha.

Studi Kasus Kritis: Nihiwatu dan Hilangnya Kemandirian Komunitas

Ancaman ini termanifestasi secara nyata di Kecamatan Wanokaka, Sumba Barat, yang dapat dikategorikan sebagai desa lumbung pariwisata. Di kawasan ini, tepatnya di Desa Hobawawi, terbentang Pantai Nihiwatu yang dinobatkan sebagai salah satu pantai terbaik di dunia (CNN, 2017). Keindahan ini dikelola secara eksklusif oleh Resort Nihiwatu, sebuah akomodasi bertaraf internasional yang menawarkan penginapan dengan harga mulai dari 25 juta Rupiah per malam (Nihi, 2025).

Sejarah resor ini, yang didirikan oleh warga negara asing pada 1988 dan diakuisisi oleh investor Amerika pada 2012, menandai titik balik penting. Sebelum ekspansi besar terjadi, mata pencaharian utama masyarakat Desa Hobawawi adalah sebagai petani ladang, dengan pekerjaan sampingan sebagai nelayan hingga menjadi pegawai di Resort Nihiwatu itu sendiri (Lazuardi, ME., et. al., 2014). Namun, privatisasi pantai pada tahun 2012 mengubah dinamika tersebut, membatasi akses dan hak mandiri warga atas tanah mereka. Ekspansi resor kemudian secara inheren menuntut adanya pembelian dan alih fungsi lahan dari area produktif menjadi properti pariwisata eksklusif.

Sebagai kompensasi, resor menerapkan kebijakan CSR yang di atas kertas tampak ideal, seperti memprioritaskan 90% pekerjanya dari masyarakat lokal dan mengadakan program kesehatan untuk revitalisasi air serta pencegahan malaria. Namun, model filantropi seperti ini justru melahirkan 'kesejahteraan semu'. Ia menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap resor dan memicu kecemburuan sosial terkait perekrutan tenaga kerja, tanpa menyentuh akar masalah kemandirian ekonomi.

Kondisi ini sejatinya adalah bom waktu. Jika resor mengalami kemunduran atau bangkrut, komunitas akan menghadapi krisis ganda: mereka kehilangan sumber mata pencaharian utama sekaligus lahan produktif yang telah tergusur. Lahan yang telah menjadi pondasi beton tidak dapat dengan mudah dikembalikan menjadi lahan pertanian. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan model bantuan yang berfokus untuk mendukung kemandirian finansial masyarakat, misalnya melalui edukasi dan pelatihan untuk pertanian yang berkelanjutan dan efektif, sehingga masyarakat tidak harus menggantungkan hidupnya kepada resor.

Kegagalan model CSR ini berakar pada ketidakmampuan atau keengganan untuk membedah dinamika kuasa dan kepentingan (*power and interest*) yang timpang antara pemangku kepentingan. Relasi antara investor, pemerintah, dan komunitas lokal yang tidak setara inilah yang membuat kepentingan komunitas selalu berada di posisi paling lemah, (analisis mendalam mengenai relasi ini akan dijabarkan pada lampiran bagian Tabel 1 dan Tabel 2). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode *check and balance* untuk memastikan

filantropi menghasilkan dampak yang konkret dan memberdayakan, bukan sekadar citra positif bagi korporasi.

Uptourism: Rekalibrasi Model Ekowisata Berbasis Dampak

Untuk mengatasi kesenjangan pada model filantropi tradisional, dibutuhkan sebuah reformasi yang terstruktur. Gagasan ini diwujudkan dalam *Uptourism*, sebuah kerangka kerja untuk merekalibrasi filantropi di sektor ekowisata. Langkah fundamental pertama dalam model ini adalah pemetaan menyeluruh terhadap seluruh pemangku kepentingan. Untuk memahami dinamika kompleks di lapangan, kerangka kerja dari panduan LKMM, yaitu analisis TALI (Tuntutan, Anjuran, Langgaran, dan Informasi) dan SIAP (Sanggup, Ingin, Aman, dan Peting), digunakan untuk membedah tugas, otoritas, loyalitas, hingga pengaruh setiap pihak (contoh penerapan kedua analisis ini dapat dilihat pada lampiran bagian Tabel 2 dan 3). Analisis ini memastikan bahwa intervensi filantropi dirancang berdasarkan kebutuhan riil komunitas, bukan sekadar program untuk citra korporasi.

Setelah memahami ‘siapa’ dan ‘bagaimana’ relasi antarpihak, dibutuhkan sebuah metode untuk mengukur dampak secara konkret. Narasi keberhasilan saja tidak cukup untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, *Uptourism* mengadopsi metodologi *Social Return on Investment* (SROI). Di tengah maraknya isu *greenwashing*, klaim dampak sosial harus didukung oleh data yang kredibel. SROI dipilih karena kemampuannya melampaui metrik konvensional. Berbeda dengan laporan CSR tradisional yang seringkali berhenti pada nominal donasi, atau *multiplier effect*) yang nyata bagi kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, SROI digunakan sebagai kompas untuk mengarahkan investasi filantropi agar fokus pada *outcome* yang paling penting bagi *stakeholder* kunci (misalnya, kemandirian ekonomi bagi komunitas), bukan hanya *output* yang diinginkan oleh donatur (contoh hipotetis perhitungan SROI untuk program di Sumba dijabarkan pada lampiran bagian Tabel 4). Lebih jauh, kuantifikasi SROI ini dapat menjadi nilai tambah (*added value*) bagi pelaku usaha pariwisata untuk membuktikan komitmen keberlanjutan mereka. Data dampak yang transparan dan akuntabel ini bahkan dapat divisualisasikan pada laman informasi resmi mereka, sejalan dengan tren global menuju ekonomi berkelanjutan (visualisasi data diilustrasikan pada lampiran bagian Gambar 1) .

Strategi Konkret Pencegahan Alih Fungsi Lahan

Bentuk intervensi konkret bagi filantropi di daerah lumbung pariwisata adalah dengan menciptakan simbiosis mutualisme antara sektor pertanian dan akomodasi pariwisata.

Strategi pertama adalah membangun rantai pasok berbasis komunitas. Kembali pada studi kasus di Sumba, filantropi dapat mendanai dan membimbing petani-petani kecil agar mampu menjadi pemasok bahan baku pangan berkualitas bagi resor seperti Nihiwatu. Sebagai contoh, pengembangan produk pangan lokal seperti sorgum dari petani Hobawawi tidak hanya menciptakan pasar yang stabil bagi petani, tetapi juga memberikan nilai cerita (*storytelling value*) yang otentik bagi resor. Model ini, yang dampaknya harus selalu terukur melalui SROI, dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan menjadikan pertanian sebagai profesi yang setara dan menguntungkan.

Selain menjadi pemasok, filantropi dapat mendorong strategi kedua, mengintegrasikan kegiatan pertanian menjadi produk wisata. Dengan dana CSR, komunitas dapat dibina untuk meningkatkan kualitas pertaniannya (misalnya, beralih ke pertanian organik) sekaligus merancang paket-paket wisata. Dalam model ini, wisatawan mendapatkan pengalaman otentik seperti ikut bertani atau mengolah hasil panen, sementara petani memperoleh pendapatan ganda: dari hasil panen dan dari jasa ekowisata. Hal ini secara langsung memberi insentif ekonomi untuk mempertahankan lahan produktif.

Intervensi filantropi ini diharapkan menjadi katalisator untuk strategi jangka panjang, yaitu penguatan kelembagaan dan regulasi lokal. Program pendampingan harus bertujuan untuk melahirkan komunitas-komunitas mandiri yang mampu mengelola lahan strategis secara kolektif melalui Bumdes atau Koperasi, sehingga lahan tidak mudah dijual perorangan. Pada akhirnya, komunitas yang berdaya ini diharapkan mampu melakukan advokasi untuk mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes) yang melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan mengatur zonasi pengembangan pariwisata secara adil.

Menuju Paradigma Baru Filantropi Pariwisata

Perjalanan pariwisata Indonesia berada di persimpangan krusial. Di satu sisi, ia adalah mesin ekonomi yang menjanjikan kesejahteraan, tetapi disisi lain, pendekatannya yang seringkali eksploitatif berisiko merusak esensi yang dijualnya, yaitu alam yang lestari, budaya yang otentik, dan komunitas yang hidup. Sebagaimana disebutkan dalam kutipan pembuka, pariwisata yang hanya "menyembuhkan" manusia dengan mengorbankan alam adalah sebuah ilusi keberlanjutan. Studi kasus di Sumba menunjukkan dengan gamblang bahwa model filantropi konvensional yang bersifat karitatif dan tidak terukur, alih-alih memberdayakan, justru dapat menciptakan ketergantungan dan melanggengkan ketimpangan.

Untuk itu, dibutuhkan sebuah rekalibrasi fundamental. Gagasan *Uptourism* yang diajukan dalam esai ini bukanlah sekadar program alternatif, melainkan sebuah proposal untuk mengubah paradigma. Dengan mengawali intervensi melalui analisis pemangku kepentingan yang cermat (menggunakan kerangka TALI dan SIAP), model ini memastikan bahwa setiap program dirancang berdasarkan kebutuhan riil komunitas, bukan asumsi donatur. Selanjutnya, adopsi metode *Social Return on Investment* (SROI) berfungsi sebagai kompas akuntabilitas, menerjemahkan dampak sosial dan lingkungan ke dalam metrik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka ini menjadi fondasi untuk mengimplementasikan strategi konkret seperti penguatan rantai pasok lokal dan pengembangan agro-ekowisata, yang secara inheren melindungi lahan produktif sekaligus memberdayakan petani.

Pada akhirnya, *Uptourism* adalah sebuah manifesto. Ini adalah cara filantropi untuk beralih peran, dari sekadar ‘pemberi ikan’ yang memberikan bantuan sesaat, menjadi 'pemberi kail’ yang turut membangun fondasi kemandirian jangka panjang. Untuk mewujudkan visi ini, kolaborasi multipihak menjadi kunci. Lembaga Filantropi perlu mengadopsi kerangka pengukuran dampak yang lebih akuntabel. Pemerintah harus menciptakan ekosistem regulasi yang melindungi lahan agraris sekaligus memberi insentif bagi model ekowisata otentik. Terakhir, komunitas lokal, dengan didampingi oleh akademisi dan praktisi, harus menjadi subjek aktif yang berani menyuarakan kebutuhan dan mengelola masa depan ruang hidupnya sendiri. Dengan demikian, pariwisata tidak lagi menjadi sumber luka, melainkan benar-benar menjadi gema dari surga yang menyembuhkan, baik bagi manusia, maupun bagi alamnya.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Travel. (2017, Juli 10). *100 of the world's best beaches*. CNN. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari https://www.cnn.com/travel/article/100-best-beaches

Lazuardi, M.E., Sanjaya W., Hutasoit P., Welly M. & Subijanto J. (2014). Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi di Selatan Pulau Sumba – Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sanur – Bali: Coral Triangle Center. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari https://elearning.unkriswina.ac.id/pluginfile.php/15199/mod_folder/content/0/sosial%20ekonomi_2.pdf?forcedownload=1

Nihi Sumba. (n.d.). *Nihi Sumba*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari https://nihi.com

Portal Informasi Indonesia. (2025, Januari 2). *Geliat sektor pariwisata pacu pertumbuhan ekonomi*. Portal Informasi Indonesia. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9026/geliat-sektor-pariwisata-pacu-pertumbuhan-ekonomi?lang=1

Pramudita, B. (2024, November 13). *95% wisatawan Indonesia rela bayar lebih untuk akomodasi ramah lingkungan*. Marketeers. Diakses pada 8 Agustus 2025, dari https://www.marketeers.com/95-wisatawan-indonesia-rela-bayar-lebih-untuk-akomodasi-ramah-lingkungan/

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2020). *Statistik lahan pertanian tahun 2015-2019*. Kementerian Pertanian. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Lahan_Pertanian_Tahun_2015-2019.pdf

Roru, Y.U., Putra, I.N.Y., & Suardana, I. W. (2018). Corporate Social Responsibility (CSR) Resor Nihiwatu sebagai Bentuk Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Harian Regional,* JUMPA 4 [2] : 189 - 204. Diakses pada 10 Agustus 2025 dari https://ejournal.undana.ac.id/index.php/jhr/article/view/5833

Septasawitri, D., Prabawani, B., & Nugraha, H. S. (2023). Analisis Social Return On Investment (SROI) dalam penerapan program ketahanan ekonomi dan pangan rumah

tangga Desa Dendang. Jurnal Administrasi Bisnis, 12(1), 43–53. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari https://doi.org/10.14710/jab.v12i1.45914

Wirawan, J. (2015, Juni 25). *Sampah di gunung-gunung Indonesia 'mengkhawatirkan'*. BBC News Indonesia. Diakses pada 8 Agustus 2025, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150625_indonesia_sampah_gunung

LAMPIRAN

Gambar 1: Contoh Visualisasi Data Dampak dengan Metode SROI pada *Website*

(Sumber: *editing* penulis)

Lampiran 1: Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Utama Ekowisata Sumba

Tabel berikut contoh identifikasi para pemangku kepentingan utama dalam ekosistem ekowisata di Sumba, beserta peran dan kepentingan masing-masing pihak. Analisis ini menjadi dasar untuk memahami dinamika relasi kuasa yang terjadi di lapangan.

No.	Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Peran Utama	Kepentingan Utama (*Interest*)
1.	**Komunitas Lokal** (Petani, Nelayan, Pengrajin)	- Pemilik asli sumber daya (lahan, laut, budaya); - Penyedia tenaga kerja; - Subjek utama program pemberdayaan.	- Menjaga keberlanjutan sumber kehidupan (lahan & laut). - Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. - Pelestarian nilai budaya dan adat. - Mendapatkan akses dan kontrol atas wilayah adat.
2.	**Investor & Pengelola Resor** (Contoh: Nihiwatu)	- Pengembang utama infrastruktur pariwisata; - Pencipta lapangan kerja; - Pelaksana program CSR.	- Memaksimalkan keuntungan investasi (*Return on Investment*). - Menjaga citra merek dan eksklusivitas. - Memastikan keamanan dan stabilitas operasional. - Memenuhi standar keberlanjutan internasional (jika ada).
3.	**Pemerintah Daerah** (Pemda Sumba Barat)	- Regulator (penerbit izin, penata ruang); - Fasilitator antara investor dan komunitas; - Pemungut Pajak & Retribusi.	- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). - Pembangunan infrastruktur wilayah. - Stabilitas sosial dan politik di daerah. - Mencapai target pembangunan daerah.

4.	**Pemerintah Pusat** (Kemenparekraf & Kementerian Terkait)	- Penentu kebijakan pariwisata nasional; - Promotor destinasi di tingkat internasional; - Alokator dana pembangunan.	- Mencapai target pariwisata nasional (devisa, jumlah wisman). - Menjaga citra positif pariwisata Indonesia. - Memastikan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
5.	**NGO/LSM** (Lingkungan & Sosial)	- Pengawas (advokasi & monitoring dampak); - Pendamping komunitas; - Katalisator program pemberdayaan.	- Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. - Penegakan hak-hak komunitas lokal. - Mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. - Akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah & korporasi.
6.	**Tokoh Adat (Rato)**	- Penjaga nilai dan hukum adat (Marapu); - Mediator konflik internal komunitas; - Pemimpin spiritual dan budaya.	- Kelestarian ritual dan tradisi adat. - Keutuhan dan kedaulatan wilayah adat. - Keseimbangan hubungan antara manusia dan alam (spiritual).

7.	**Wisatawan** (Domestik & Mancanegara)	- Konsumen utama jasa pariwisata; - Sumber pendapatan langsung; -Penyebar informasi (promosi/kritik).	- Mendapatkan pengalaman wisata yang otentik dan berkualitas. - Keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. - (Bagi sebagian) Berwisata secara etis dan berkelanjutan.

Lampiran 2: Contoh Analisis TALI (Tuntutan, Anjuran, Langgaran, Informasi)

Analisis TALI digunakan untuk membedah dinamika antar pemangku kepentingan. Tabel berikut menyajikan contoh analisis TALI terhadap tiga pemangku kepentingan kunci dalam isu ekowisata di Sumba untuk mengidentifikasi potensi konflik dan kolaborasi.

Pemangku Kepentingan	Tuntutan	Anjuran	Langgaran (Potensi)	Informasi
1. Komunitas Lokal	- Menuntut hak akses ke lahan & laut yang menjadi ruang hidup mereka. - Menuntut kompensasi yang adil atas alih fungsi lahan. - Menuntut dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.	- Menyarankan agar model pembangunan menghormati hukum adat dan tidak merusak lingkungan. - Menyarankan agar perekrutan tenaga kerja dilakukan secara transparan dan adil.	Potensi melakukan aksi protes atau pemblokiran jika merasa hak-haknya terabaikan, yang bisa dianggap melanggar ketertiban umum.	**Memiliki:** Pengetahuan lokal (kearifan lokal) tentang ekosistem, budaya, dan sejarah wilayah. **Membutuhkan:** Informasi transparan mengenai rencana jangka panjang investor dan detail regulasi dari pemerintah.

2. Investor & Pengelola Resor	- Menuntut adanya kepastian hukum dan keamanan atas investasi jangka panjang mereka. - Menuntut ketersediaan tenaga kerja lokal yang memenuhi standar industri. - Menuntut lingkungan yang kondusif untuk operasional bisnis.	- Menyarankan agar pemerintah menegakkan regulasi yang mendukung iklim investasi. - Menyarankan agar komunitas lokal bersikap terbuka dan kooperatif terhadap pembangunan.	- Potensi melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). - Potensi melanggar hak-hak pekerja atau kesepakatan informal dengan komunitas jika tidak ada pengawasan ketat.	**Memiliki:** Informasi mengenai tren pasar pariwisata global, akses ke modal, dan rencana bisnis detail. **Membutuhkan:** Pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan budaya lokal untuk mitigasi risiko.
3. Pemerintah Daerah	- Menuntut investor untuk mematuhi seluruh perizinan dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). - Menuntut komunitas untuk menjaga ketertiban dan	-Menganjurkan adanya dialog dan skema kemitraan yang saling menguntungkan antara investor dan komunitas. -Menganjurkan agar program CSR selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.	- Potensi melakukan maladministrasi atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang. - Potensi membuat kebijakan yang bias dan lebih menguntungkan pihak dengan kekuatan lobi lebih besar (biasanya investor).	**Memiliki:** Informasi mengenai regulasi, data perencanaan wilayah, dan data statistik daerah. **Membutuhkan:** Data sosial-ekonomi yang akurat di tingkat tapak dan kapasitas untuk melakukan pengawasan yang efektif.

	mendukung program pembangunan.			

Lampiran 3: Contoh Analisis SIAP (Sanggup, Ingin, Aman, Peting)

Analisis SIAP digunakan untuk memetakan kekuatan, minat, dan pengaruh dari setiap pemangku kepentingan. Analisis ini membantu merancang strategi intervensi yang realistis dengan mempertimbangkan posisi tawar masing-masing pihak.

Pemangku Kepentingan	Sanggup (Kemampuan)	Ingin (Keinginan)	Aman (Keamanan Posisi)	Peting (Pengaruh & Kepentingan Strategis)
1. Komunitas Lokal	**Rendah-Menengah:** Kemampuan kolektif untuk bertahan hidup tinggi, namun kapasitas individu dalam hal manajerial, akses modal, dan negosiasi formal rendah.	**Tinggi:** Keinginan sangat tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga ruang hidup (lahan & budaya). Namun, bisa terpecah antara keinginan ekonomi instan dan pelestarian jangka panjang.	**Rendah:** Posisi paling tidak aman. Sangat rentan terhadap tekanan eksternal (investor, kebijakan pemerintah). Aset utama (lahan) terancam hilang.	**Tinggi:** Pengaruh formal rendah, namun pengaruh informal (potensi konflik sosial, legitimasi program) sangat tinggi. Merupakan stakeholder paling penting bagi keberlanjutan sosial dan keaslian produk ekowisata.

2. Investor & Pengelola Resor	**Sangat Tinggi:** Memiliki kapasitas finansial, teknis, manajerial, dan akses jaringan pasar yang sangat kuat.	**Sangat Tinggi:** Keinginan utama adalah memaksimalkan keuntungan (*profit-driven*). Keinginan untuk keberlanjutan sosial seringkali bersifat sekunder atau sebagai strategi citra (*branding*).	**Sangat Tinggi:** Posisi sangat aman, dilindungi oleh kekuatan modal dan kepastian hukum (izin usaha). Mampu menyerap risiko bisnis dengan lebih baik.	**Sangat Tinggi:** Pengaruh sangat dominan, baik secara ekonomi (pencipta lapangan kerja) maupun politik (kemampuan lobi). Keputusan mereka sangat menentukan arah pembangunan fisik di suatu kawasan.
3. Pemerintah Daerah	**Tinggi:** Memiliki otoritas formal untuk membuat dan menegakkan regulasi (perizinan, tata ruang). Namun, kapasitas untuk pengawasan efektif di lapangan seringkali terbatas.	**Tinggi:** Keinginan utama adalah meningkatkan PAD dan mencapai target pembangunan fisik. Keinginan untuk menjaga keseimbangan sosial-lingkungan bisa bervariasi, tergantung pada visi politik dan tekanan dari berbagai pihak.	**Menengah:** Posisi relatif aman secara institusional, namun rentan terhadap tekanan politik dari pemerintah pusat, tuntutan dari investor, dan potensi gejolak sosial dari komunitas.	**Sangat Tinggi:** Pengaruh sangat besar sebagai regulator, fasilitator, dan penentu iklim investasi. Merupakan "wasit" yang idealnya harus bisa menyeimbangkan kepentingan semua pihak.

Tabel 4: Contoh Model Perhitungan SROI

Ilustrasi berikut merupakan ilustrasi perhitungan SROI pada Fase 2 Palapa yang diadaptasi dari Septasawitri, Prabawani, & Susanta, 2023				
No	**Dampak**	**Indikator**	**Pendekatan Monetisasi**	**Nilai (*Value*)**
A. Komunitas Selatan Puake (Juli 2020 - Juni 2021)				
1	Penghematan & Peningkatan Pendapatan (Sayuran)	Rata-rata hasil panen/penghematan per bulan sebesar Rp 500.000.	Penghematan/bulan x 12 bulan x jumlah anggota	Rp 48.000.000
2	Penghematan & Peningkatan Pendapatan (Budidaya Lele)	Rata-rata hasil panen/penghematan per bulan sebesar Rp 350.000.	Peningkatan pendapatan/bulan x 12 bulan x jumlah anggota	Rp 33.600.000
3	Adanya kegiatan gotong royong	16 anggota mengikuti kegiatan gotong royong membangun fasilitas.	Upah harian x jumlah anggota x jumlah pertemuan	Rp 14.400.000
4	Memperoleh kapasitas dan pengetahuan	16 anggota (2020) & 9 anggota (2021) mendapat pelatihan.	Biaya pendaftaran (proksi) x jumlah anggota x jumlah pelatihan	Rp 17.500.000
5	Adanya motivasi dan kepercayaan diri	16 anggota (2020) & 9 anggota (2021) mendapat bantuan alat.	Biaya seminar motivasi (proksi) x jumlah anggota	Rp 3.750.000

6	Adanya biaya transportasi	Biaya transportasi Rp 200.000 per pengiriman.	Biaya transportasi x jumlah pengiriman	- Rp 600.000
B. Kelompok Miana (Juli - Desember 2021)				
1	Penghematan & Peningkatan Pendapatan (Sayuran)	Rata-rata hasil panen/penghematan per bulan sebesar Rp 500.000 untuk 21 anggota.	Penghematan/bulan x 6 bulan x jumlah anggota	Rp 63.000.000
2	Adanya kesediaan gotong royong	21 anggota bergotong royong membangun rumah bibit.	Upah minimum harian x jumlah anggota x jumlah hari kerja	Rp 25.200.000
3	Memperoleh kapasitas dan pengetahuan	21 anggota memperoleh 2 kali pelatihan.	Biaya pendaftaran pelatihan (proksi) x jumlah anggota	Rp 14.700.000
4	Memperoleh motivasi dan kepercayaan diri	21 anggota memperoleh bantuan alat dan pemasaran.	Biaya seminar motivasi (proksi) x jumlah anggota	Rp 3.150.000
5	Memiliki kas kelompok	Hasil panen kelompok dalam 6 bulan.	Total hasil panen	Rp 3.000.000
6	Adanya biaya perawatan dan hama	Biaya perawatan Rp 17.000 per dua bulan untuk 21 orang.	Biaya perawatan x periode x jumlah anggota	- Rp 1.071.000
C. Kelompok Mina Jaya (April - November 2021)				
1	Memiliki kas kelompok	Total hasil panen lele (100kg konsumsi & 41kg jual).	Hasil panen x harga jual lele	Rp 5.025.000

2	Adanya kesediaan gotong royong	15 anggota bergotong royong membangun kolam.	Upah minimum harian x jumlah anggota x jumlah hari kerja	Rp 24.000.000
3	Bertambahnya wawasan dan kapasitas	15 anggota memperoleh pelatihan.	Biaya pendaftaran (proksi) x jumlah anggota	Rp 9.750.000
4	Adanya motivasi dan peningkatan kepercayaan diri	15 anggota mendapatkan bantuan alat dan bahan.	Biaya pendaftaran (proksi) x jumlah anggota	Rp 2.250.000
5	Adanya biaya untuk membeli pakan lele	Total biaya pakan selama program.	Total biaya pakan	- Rp 2.786.000
d. Pembeli dari Masyarakat				
1	Mendapatkan harga sayuran lebih murah	Selisih harga jual kelompok dengan harga pasar (Rp 5.000/kg).	Selisih harga x total hasil panen yang dibeli	Rp 10.500.000
2	Mendapatkan harga lele lebih murah	Selisih harga jual kelompok dengan harga pasar (Rp 3.000/kg).	Selisih harga x total hasil panen yang dibeli	Rp 423.000
3	Hemat biaya transportasi	Ongkos pulang-pergi ke pasar utama.	Biaya transport x jumlah perjalanan	Rp 30.000

Nilai SROI didapatkan dari perbandingan total nilai manfaat sebesar Rp189.974.761 dengan nilai total biaya program sebesar Rp24.199.125

SROI = Rp189.974.761/Rp24.199.125 = 7,84

Dengan demikian rasio SROI yang ditemukan dalam penelitian ini 7,84:1 di luar aspek-aspek yang belum dapat dimonetisasi. Rasio bermakna bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan dampak sosial sebesar Rp7,84.